

## Pemerintah Dorong Sawit RI Dikelola Berkelanjutan

Tanggal : Kamis , 03 Desember 2020  
 Media : Investor Daily  
 Halaman : 12  
 Wartawan : Tri Listiyarini, Ridho Syukra  
 Muatan Berita : Netral  
 Narasumber : Airlangga Hartarto (*Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian*)  
 Rubrik : Agribusiness  
 Topik : Sawit

# Pemerintah Dorong Sawit RI Dikelola Berkelanjutan

Oleh **Ridho Syukra** dan **Tri Listiyarini**

► JAKARTA – Pemerintah mendorong komoditas sawit Indonesia dikelola secara berkelanjutan agar komoditas tersebut nantinya tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi tapi juga sosial dan lingkungan. Pemerintah telah mengeluarkan empat regulasi guna merealisasikan hal tersebut.

Regulasi itu adalah UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Inpres No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Inpres No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, dan Perpres No 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sebagai penyumbang ketiga terbesar bagi produk domestik bruto (PDB) nasional, sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) juga mengalami tren penurunan pertumbuhan. Hanya saja, sektor pertanian memiliki ketahanan lebih baik dari sektor industri dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Untuk mengatasi keterpurukan dan menjaga pertumbuhan sektor pertanian tetap terjaga maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung sektor tersebut, termasuk industri sawit nasional," kata Airlangga saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 yang bertema *Palm Oil Industry in The New Normal Economy* yang digelar daring, Rabu (2/12).

Dampak multimensi Covid-19 telah mengganggu aktivitas sosial-ekonomi nasional dan menjadi agenda bersama untuk segera bangkit kem-

bal di dari krisis. Sinyal positif pemulihan ekonomi telah tampak berkat stimulus dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 diharapkan bisa sebesar 4,45-5,20%, dengan asumsi penyebaran Covid-19 terkendali melalui efektivitas distribusi vaksin pada awal 2021. "Untuk memastikan kita dapat bangkit kembali sebagai bangsa, kita perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menanggapi dampak pandemi dan menuntut arah bagi pemulihan yang transformatif. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan nasional, tentunya dengan pertimbangan pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai penganganan lingkungan, sosial, dan ekonomi," jelas dia.

Selama ini, industri sawit telah berkontribusi signifikan bagi lapangan kerja, dengan lebih dari 16 juta orang dipekerjakan dan memberikan kontribusi rata-rata US\$ 20 miliar per tahun. Bahkan, selama pandemi, industri minyak sawit terus memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi dan masih menunjukkan perkembangan yang positif. "Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menegaskan bahwa kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi tetapi juga aspek sosial dan lingkungan masyarakat? Jawabannya adalah melalui reg-

ulasi yang efektif. Upaya pemerintah membuat sawit lebih baik dan lebih sesuai untuk semua harus dipahami oleh semua, bisnis harus merangkul lingkungan sosial dan kelompok garis bawah yang lumpuh finansial. Karena itu, mari memperkuat pengembangan sawit berkelanjutan," ujar Airlangga.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, 2020 menjadi tahun yang penuh gejolak karena dampak pandemi Covid-19. Saat ini, hampir semua negara termasuk Indonesia mengalami penurunan ekonomi. Setiap bisnis menghadapi tantangan perencanaan, perkembangan, dan strategi bisnis, pun dengan industri sawit meski perkebunan dan pabrik sawit masih beroperasi dengan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Tahun ini diwarnai ketidakpastian karena Covid-19, *lockdown* menjadi pilihan mencegah penularan virus. *Lockdown* di negara-negara Eropa dan Asia telah berpengaruh pada permintaan minyak nabati, termasuk minyak sawit sehingga performa ekspor sawit nasional juga ikut terdampak," jelas dia.

Namun demikian, Joko meyakini pada kuartal IV-2020 sudah terlihat tanda-tanda bahwa pasar ekspor mulai membaik, permintaan dari beberapa negara tujuan ekspor meningkat yang diikuti dengan peningkatan tren harga minyak sawit. Yang pasti, meski ekspor sawit Indonesia menurun akibat pandemi Covid-19, ada angin segar dari Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap konsisten mengimplementasikan mandatori program B30 di tengah rendahnya harga minyak bumi, inilah yang membantu menjaga dan menstabilkan konsumsi sawit domestik. Konsumsi sawit domestik yang meningkat juga karena berkembangnya industri oleokimia sebagai penghasil produk pencegah transmisi virus, seperti produk sanitasi sabun dan disinfektan. "Dan industri kelapa sawit akan selah-

mendukung program pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dari mandatori biodiesel dan memastikan bahwa kita dapat mengelola 100% pemulihan pasar sawit domestik," ujar Joko.

### Implementasi Regulasi

Airlangga menuturkan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memastikan bisa memenuhi hak-hak warga negara melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja. Hal ini juga terwujud dalam kepeningkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat Indonesia yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. Untuk mengawal pendekatan revolusioner dalam koridor pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres No 8 Tahun 2018. Inpres itu membatasi perluasan perkebunan sawit, memastikan izin yang dikeluarkan telah memenuhi standar regulasi dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan seperti legalitas tanah, menyelesaikan izin yang tumpang tindih, mengambil lahan yang tidak diidudkan pemegang izin, dan meningkatkan produktivitas lahan.

Melalui Inpres No 6 Tahun 2019, pemerintah juga ingin memastikan terjadinya keseimbangan pembangunan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan rencana aksi yang jelas. Sementara melalui Perpres No 44 Tahun 2020, pemerintah akan memastikan dan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perkebunan sawit sesuai prinsip dan kriteria Indonesian Sustainable *Palm Oil (ISPO)* sehingga meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk sawit di tingkat nasional dan global. Dalam Perpres No 44 Tahun 2020, pemerintah juga mewajibkan semua pelaku usaha termasuk petani kecil dengan masa transisi lima tahun untuk turut wajib memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. Pemerintah akan mendampingi dan memberdayakan petani dengan menyediakan akses pendanaan sertifikasi ISPO.